



BPK RI Gelar Workshop dan Entry Meeting Pemeriksaan

LKPD 2016 Wilayah Timur

MAKASSAR - BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan merupakan lembaga yang mandiri dan bebas, serta mempunyai tugas dan wewenang sebagai Badan Pengawas Keuangan disebutkan dalam UU Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada BAB III bagian kesatu dan kedua.

Anggota VI BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar dalam sambutannya pada acara Workshop dan entry meeting pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2016 Wilayah Timur, di Grand Clarion Hotel Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (29/3) mengatakan, BPK berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 BAB III bagian kedua memiliki wewenang diantaranya adalah bahwa Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan



RUSLAN HUMAS PROV.

IKUTI WORKSHOP: Sekretaris Inspektur Provinsi Kalimantan Barat bersama kepala BPK RI Perwakilan Kalbar sedang serius mengikuti Workshop dan entry meeting pemeriksaan LKPD tahun 2016 Wilayah Timur, yang berlangsung di grand Clarion Hotel Makassar Suisel, Rabu (29/3).

metode pemeriksaan serta memberi nasihat/pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyusunan maupun menyajikan laporan. Semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan pengeloaan dan tanggung jawab keuangan negara harus bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. BPK juga berwenang

pejabat yang berwenang dapat memberikan keterangan yang valid dan benar kepada pemeriksa BPK, baik itu laporan keuangan maupun kekayaan dan aset baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Acara yang berlangsung selama dua hari itu (29-30/3) diikuti oleh seluruh unsur pimpinan daerah Gubernur, Bupati dan walikota, serta para inspektur provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia, dan dihadiri

juga Anggota III BPK RI Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, sebagai narasumber yang menyampaikan materi Quasi Yudicial Pemeriksaan LKPD, dan Drs. Hamdani, MM, M.Si, salah satu staf ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan dan anggota Komite Standar akuntansi Pemerintahan, yang menyampaikan materi regulasi dan implementasi SAP berbasis Akruak dalam penyusunan keuangan Pemerintah Daerah, serta Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dengan materi yang disampaikan Deteksi Fraud dalam rangka Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum membuka dengan resmi Acara Workshop, Anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar berharap kegiatan tersebut perlu dilaksanakan secara rutin setiap tahun dalam rangka mendorong pengeloaan keuangan Negara untuk mencapai tujuan bernegara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Dimana pada tahun 2018 mendatang workshop yang sama akan dilaksanakan di Kalimantan Selatan, imbuhnya. *(ruslanhumasprov)*